

Pengaturan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik : studi kasus Putusan Nomor 58/PDT.G/2013/PN.CBN dan Keputusan Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Jakarta Nomor 5/6.7.16/2014 = Divorce regulations reviewed from Law No. 1 of 1974 Canon Law : case study of Court Verdict No.58/PDT.G/2013/PN.CBN the Church Tribunal of the Roman Catholic Archdiocese of Jakarta Verdict No.5/6.7.16/2014 / Carolina Maria Anggreini

Carolina Maria Anggreini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20413112&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sahnyanya perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi perceraian. Dalam pandangan Hukum Kanonik tidak mengenal dan mengatur mengenai perceraian karena perkawinan bersifat satu dan tidak dapat diputuskan namun Hukum Kanonik mengatur pemutusan ikatan perkawinan dan anulasi. Perceraian yang diputuskan di Pengadilan tidak semuanya dapat dianulasikan di tribunal gereja, sehingga dalam Hukum Kanonik mereka masih terikat dalam status perkawinan yang sah. Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana proses perceraian yang diputuskan oleh pengadilan negeri dan anulasi yang diputuskan oleh tribunal gerejawi.

<hr>

ABSTRACT

Law No. 1 of 1974 about Marriage regulates what is defined as a legal marriage, that if a marriage is held according to the individual's faith or beliefs, but does not apply in cases of divorce. Canon Law's perspective does not recognize nor regulate divorces because marriage is seen as a union and is indissoluble; however Canon Law regulates the termination of the bond of matrimony and its annulment. Not all divorces that are sentenced in courts are capable of being annulled by the church's tribunal, so as in Canon Law, they still have a status of a legal marriage. These cases illustrate how the divorce process is decided by the district court and annulment sentenced by the church tribunal.